

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi upaya hilirisasi pada hasil perikanan di Kabupaten Jepara yang memiliki potensi perikanan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan. Namun, potensi tersebut ternyata memerlukan adanya dorongan dari pemerintah daerah untuk berdampak pada keberhasilan pengolahan ikan. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab di bidang perikanan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Permasalahan pada penelitian ini adalah pelaksanaan tugas Dinas Perikanan dalam menerapkan upaya hilirisasi dan faktor pendukung serta faktor penghambat yang berkaitan dengan penerapan upaya hilirisasi pada peningkatan nilai tambah komoditas perikanan di Kabupaten Jepara.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan berupa penelitian doktrinal. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dan evaluatif. Jenis data penelitiannya yaitu data sekunder. Pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan upaya hilirisasi oleh Dinas Perikanan yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Dinas Perikanan Kabupaten Jepara telah menjalankan tugas dan kewenangannya pada sektor perikanan sebagai salah satu urusan pemerintah pilihan yang dilaksanakan berdasarkan potensi keunggulan daerah melalui upaya hilirisasi. Pelaksanaan upaya tersebut diwujudkan melalui penanganan pengolahan perikanan pada unit pengolahan hasil perikanan di tingkat mikro dan kecil. Akan tetapi, dalam penerapan upaya hilirisasi ternyata tidak terlepas dari faktor pendukung berupa bahan baku yang mudah diperoleh, pelaku usaha yang banyak, adanya bantuan, dan dukungan dari pemerintah. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah akses pasar yang terbatas, kurang kesadaran terhadap keamanan pangan dan fluktuasi harga. Adapun langkah yang diambil untuk mengatasi faktor tersebut yaitu melakukan kerja sama dan fasilitasi dalam pendampingan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP). Dapat disimpulkan bahwa upaya hilirisasi hasil perikanan di Kabupaten Jepara telah dilaksanakan, namun masih memerlukan penguatan agar mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan pendampingan dan optimalisasi fasilitasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP).

Kata Kunci: Dinas Perikanan, Hilirisasi, Nilai Tambah, Komoditas Perikanan, Kabupaten Jepara.